

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. SASARAN PROGRAM : 06 - Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
4. KEGIATAN : 2350 - Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Dit. Pengendalian Operasi Armada
07 - Dit. Prasarana dan Sarana Pengawasan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
02	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP		600.000,0
02.01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	100	
03	Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif		580.109.039,0
03.01	Indeks operasi pesawat patroli	95,25	
03.02	Indeks operasi kapal pengawas	92,25	
03.03	Indeks operasi speedboat pengawas	92,25	
03.04	Persentase pemenuhan logistik dan awak kapal pengawas	100	
03.05	Indeks kesiapan Awak Kapal Pengawas	80	
04	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan		108.600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
04.01	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80	
04.02	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	60	
04.03	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60	
04.04	Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	40	
04.05	Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	40	
04.06	Nilai Kualitas penyusunan dan reviu standardisasi kriteria teknis pembangunan sarana pengawasan SDKP	77,5	
04.07	Nilai Kualitas penyusunan dan reviu standardisasi kriteria teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP	77,5	
Total			689.309.039,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP</i>										600.000,0
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										350.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										4.050,0
		Pusat	Pusat								4.050,0
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										140.900,0
		Pusat	Pusat								140.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										5.050,0
		Pusat	Pusat								5.050,0
02.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Monitoring dan evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										250.000,0
02.AFA.001	NSPK bidang operasi Armada pengawasan SDKP								000 - Bukan Tematik		50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP										2.430,0
		Pusat	Pusat								2.430,0
	052 - Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP										45.140,0
		Pusat	Pusat								45.140,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP										2.430,0
		Pusat	Pusat								2.430,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.AFA.002	NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Perencanaan NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Monitoring dan evaluasi NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03	<i>Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif</i>										580.109.039,0
03.AEA	Koordinasi										500.000,0
03.AEA.001	Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional								000 - Bukan Tematik		250.000,0
	051 - Perencanaan Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional										2.500,0
		Pusat	Pusat								2.500,0
	052 - Pelaksanaan Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional										245.000,0
		Pusat	Pusat								245.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional										2.500,0
		Pusat	Pusat								2.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.AEA.002	Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		250.000,0
	051 - Perencanaan Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan										65.530,0
		Pusat	Pusat								65.530,0
	052 - Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan										174.630,0
		Pusat	Pusat								174.630,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan										9.840,0
		Pusat	Pusat								9.840,0
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam										8.879.039,0
03.BHD.001	Operasional Awak Kapal Pengawas								000 - Bukan Tematik		8.879.039,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	051 - Perencanaan Operasional Awak Kapal Pengawas										48.600,0
		Pusat	Pusat								48.600,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Operasional Awak Kapal Pengawas										8.562.522,0
		Pusat	Pusat								6.069.772,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								253.110,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								283.790,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								191.750,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								184.080,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								92.040,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								283.790,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								153.400,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								253.110,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								92.040,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								99.710,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								352.820,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								99.710,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								153.400,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Operasional Awak Kapal Pengawas										267.917,0
		Pusat	Pusat								267.917,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
03.BHD.002	Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										300.000,0
03.FAE.001	Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Perencanaan laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										25.000,0
		Pusat	Pusat								25.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										225.000,0
		Pusat	Pusat								225.000,0
	053 - Monitoring dan evaluasi laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
03.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										0,0
03.FBA.001	Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada								000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Monitoring dan evaluasi pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
03.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam										570.430.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		359.230.000,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	051 - Perencanaan Operasi Kapal Pengawas										144.140,0
		Pusat	Pusat								144.140,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas										358.576.720,0
		Pusat	Pusat								211.061.801,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								14.988.512,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								14.011.286,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								10.684.430,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								7.983.105,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								9.864.613,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								12.646.104,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								7.030.454,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								16.616.297,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								4.214.072,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								5.854.746,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								15.811.339,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								5.854.746,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								15.364.618,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								6.590.597,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas										509.140,0
		Pusat	Pusat								509.140,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
03.QHD.002	Operasi Pesawat Patroli				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		200.000.000,0
	051 - Perencanaan operasi pengawasan SDKP melalui udara										22.950,0
		Pusat	Pusat								22.950,0
	052 - Operasional pengawasan SDKP melalui udara										199.964.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								199.964.900,0
	053 - Monitoring dan evaluasi operasi pengawasan SDKP melalui udara										12.150,0
		Pusat	Pusat								12.150,0
03.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		11.200.000,0
	051 - Perencanaan operasi speedboat pengawas										119.000,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								8.500,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								8.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								8.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								8.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								8.500,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								8.500,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								8.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								8.500,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								8.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								8.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								8.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								8.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								8.500,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								8.500,0
	052 - Pelaksanaan operasi speedboat pengawas										10.962.000,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								617.030,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								265.648,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								1.776.791,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								997.796,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								787.922,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								618.591,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								492.982,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								703.512,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								586.462,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								340.597,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								1.597.738,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								557.257,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								1.363.225,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								256.449,0
	053 - Monitoring dan evaluasi operasi speedboat pengawas										119.000,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								8.500,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								8.500,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								8.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								8.500,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								8.500,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								8.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								8.500,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								8.500,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								8.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								8.500,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								8.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								8.500,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								8.500,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								8.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan</i>										108.600.000,0
04.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan										200.000,0
04.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										1.600.000,0
04.FAE.002	Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan								000 - Bukan Tematik		1.600.000,0
	051 - Perencanaan laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										1.600.000,0
		Pusat	Pusat								1.600.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.FBA.002	Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan evaluasi pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
04.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan										10.000.000,0
04.RAL.001	Kapal Pengawas				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Pengadaan Kapal Pengawas										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	055 - Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan (ABT)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.RAL.002	Speedboat Pengawas				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan pengadaan speedboat pengawas										0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pengadaan speedboat pengawas perikanan										0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Monitoring dan evaluasi pengadaan speedboat pengawas										0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
04.RAL.003	Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		10.000.000,0
	051 - Perencanaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)										9.800.000,0
		Pusat	Pusat								9.800.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
04.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan										6.800.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		6.800.000,0
	051 - Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP										0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP										6.800.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								1.600.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								4.500.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								700.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	057 - Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (ABT)										0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup										90.000.000,0
04.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut	000 - Bukan Tematik		90.000.000,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	051 - Perawatan Darurat										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas										411.330,0
		Pusat	Pusat								400.250,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								720,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								640,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								690,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								810,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								860,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								740,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								740,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								680,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								750,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								860,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								860,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								890,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								890,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								950,0
	053 - Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas										89.386.124,0
		Pusat	Pusat								41.607.492,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								5.757.320,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								3.613.460,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								3.003.280,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								2.605.060,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								2.877.620,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								2.367.120,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.093.620,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								3.416.920,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								1.357.220,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								3.977.320,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								5.523.700,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								4.383.920,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								5.796.612,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								1.005.460,0
	054 - Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas										202.546,0
		Pusat	Pusat								191.466,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								720,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								640,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								690,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								810,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								860,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								740,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								740,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								680,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								750,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								860,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								860,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								890,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								890,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								950,0
Total											689.309.039,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP				600.000,0				1.500.000,0	1.540.000,0	1.540.000,0
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		350.000,0				1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan		150.000,0	1	1	1	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
02.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	4.050,0	4.050,0	1,0	1,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
02.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	140.900,0	140.900,0	1,0	1,0	0,0	800.000,0	800.000,0	800.000,0
02.ABW.001.053	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Rekomendasi Kebijakan	5.050,0	5.050,0	1,0	1,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi Kebijakan		200.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.ABW.002.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABW.002.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	Rekomendasi kebijakan	0,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABW.002.053	Monitoring dan evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		250.000,0				500.000,0	540.000,0	540.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.AFA.001	NSPK bidang operasi Armada pengawasan SDKP	1	NSPK		50.000,0	1	1	1	500.000,0	540.000,0	540.000,0
02.AFA.001.051	Persiapan Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	1,0	NSPK	2.430,0	2.430,0	1,0	1,0	1,0	50.000,0	60.000,0	60.000,0
02.AFA.001.052	Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	1,0	NSPK	45.140,0	45.140,0	1,0	1,0	1,0	350.000,0	360.000,0	360.000,0
02.AFA.001.053	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	1,0	NSPK	2.430,0	2.430,0	1,0	1,0	1,0	100.000,0	120.000,0	120.000,0
02.AFA.002	NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	1	NSPK		200.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.AFA.002.051	Perencanaan NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.AFA.002.052	Pelaksanaan NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	0,0	NSPK	0,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AFA.002.053	Monitoring dan evaluasi NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif				580.109.039,0				490.490.310,0	527.470.000,0	559.248.000,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		500.000,0				570.000,0	593.000,0	733.000,0
03.AEA.001	Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	4	kegiatan		250.000,0	2	2	2	310.000,0	330.000,0	465.000,0
03.AEA.001.051	Perencanaan Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	1,0	laporan	2.500,0	2.500,0	1,0	1,0	1,0	5.000,0	5.000,0	7.500,0
03.AEA.001.052	Pelaksanaan Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	1,0	kegiatan	245.000,0	245.000,0	1,0	1,0	1,0	300.000,0	320.000,0	450.000,0
03.AEA.001.053	Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	1,0	laporan	2.500,0	2.500,0	1,0	1,0	1,0	5.000,0	5.000,0	7.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.AEA.002	Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	1	kegiatan		250.000,0	2	2	2	260.000,0	263.000,0	268.000,0
03.AEA.002.051	Perencanaan Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	1,0	laporan	65.530,0	65.530,0	1,0	1,0	1,0	70.000,0	72.000,0	73.000,0
03.AEA.002.052	Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	1,0	kegiatan	174.630,0	174.630,0	1,0	1,0	1,0	180.000,0	181.000,0	182.000,0
03.AEA.002.053	Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	1,0	laporan	9.840,0	9.840,0	1,0	1,0	1,0	10.000,0	10.000,0	13.000,0
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		Operasi		8.879.039,0				10.000.000,0	10.500.000,0	12.000.000,0
03.BHD.001	Operasional Awak Kapal Pengawas	60	Operasi		8.879.039,0	180	180	180	10.000.000,0	10.500.000,0	12.000.000,0
03.BHD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	0,0	hari operasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.001.051	Perencanaan Operasional Awak Kapal Pengawas	0,0	laporan	0,0	48.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.001.052	Pelaksanaan Operasional Awak Kapal Pengawas	90,0	operasi	95.139,1	8.562.522,0	100,0	100,0	100,0	10.000.000,0	10.500.000,0	12.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.BHD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Operasional Awak Kapal Pengawas	0,0	laporan	0,0	267.917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.002	Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL	0	Operasi		0,0	50	50	50	0,0	0,0	0,0
03.BHD.002.051	Perencanaan Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.002.052	Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL	0,0	hari operasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.002.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Layanan		300.000,0				980.310,0	1.060.000,0	1.170.000,0
03.FAE.001	Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	3	Laporan		300.000,0	4	4	0	980.310,0	1.060.000,0	1.170.000,0
03.FAE.001.051	Perencanaan laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1,0	Laporan	25.000,0	25.000,0	1,0	0,0	0,0	230.310,0	250.000,0	300.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.FAE.001.052	Pelaksanaan laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	0,0	laporan	0,0	225.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	550.000,0	600.000,0
03.FAE.001.053	Monitoring dan evaluasi laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	0,0	laporan	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0	260.000,0	270.000,0
03.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		0,0				1.000.000,0	1.000.000,0	0,0
03.FBA.001	Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)		0,0	25	25	25	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0
03.FBA.001.051	Perencanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada	1,0	laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0
03.FBA.001.052	Pelaksanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada	1,0	Pemerintah Daerah	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	800.000,0	800.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.FBA.001.053	Monitoring dan evaluasi pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada	1,0	Pemerintah Daerah	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0
03.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		Operasi		570.430.000,0				477.940.000,0	514.317.000,0	545.345.000,0
03.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	60	Operasi		359.230.000,0	117	120	122	400.000.000,0	420.000.000,0	450.000.000,0
03.QHD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	0,0	hari operasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.001.051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas	1,0	laporan	144.140,0	144.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.001.052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	60,0	hari operasi	5.976.278,7	358.576.720,0	80,0	100,0	120,0	400.000.000,0	420.000.000,0	450.000.000,0
03.QHD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas	1,0	laporan	509.140,0	509.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.002	Operasi Pesawat Patroli	250	Operasi		200.000.000,0	200	200	200	50.000.000,0	50.037.000,0	75.045.000,0
03.QHD.002.051	Perencanaan operasi pengawasan SDKP melalui udara	1,0	Laporan	22.950,0	22.950,0	1,0	0,0	0,0	19.800,0	25.000,0	30.000,0
03.QHD.002.052	Operasional pengawasan SDKP melalui udara	12,0	hari operasi	16.663.741,7	199.964.900,0	12,0	0,0	0,0	49.971.200,0	50.000.000,0	75.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.QHD.002.053	Monitoring dan evaluasi operasi pengawasan SDKP melalui udara	1,0	Laporan	12.150,0	12.150,0	1,0	0,0	0,0	9.000,0	12.000,0	15.000,0
03.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	20	Operasi		11.200.000,0	70	70	70	27.940.000,0	44.280.000,0	20.300.000,0
03.QHD.003.051	Perencanaan operasi speedboat pengawas	15,0	laporan	7.933,3	119.000,0	15,0	14,0	1,0	239.000,0	259.000,0	150.000,0
03.QHD.003.052	Pelaksanaan operasi speedboat pengawas	15,0	Hari Operasi	730.800,0	10.962.000,0	15,0	14,0	1,0	27.462.000,0	43.762.000,0	20.000.000,0
03.QHD.003.053	Monitoring dan evaluasi operasi speedboat pengawas	15,0	laporan	7.933,3	119.000,0	15,0	14,0	1,0	239.000,0	259.000,0	150.000,0
04	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan				108.600.000,0				2.308.522.856,0	4.339.959.176,0	89.200.000,0
04.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Unit		200.000,0				4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0
04.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2	Unit		200.000,0	280	280	280	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0
04.CAL.001.051	Pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	190,0	unit	1.052,6	200.000,0	190,0	190,0	190,0	4.200.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Layanan		1.600.000,0				5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
04.FAE.002	Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Laporan		1.600.000,0	4	4	4	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
04.FAE.002.051	Perencanaan laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FAE.002.052	Pelaksanaan laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12,0	laporan	133.333,3	1.600.000,0	21,0	12,0	12,0	5.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
04.FAE.002.053	Monitoring dan Evaluasi laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		0,0				0,0	0,0	0,0
04.FBA.002	Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	0	Daerah (Prov/Kab/Kota)		0,0	25	25	25	0,0	0,0	0,0
04.FBA.002.051	Perencanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FBA.002.052	Pelaksanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	0,0	Pemerintah daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FBA.002.053	Monitoring dan evaluasi pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Unit		10.000.000,0				2.224.874.214,0	4.287.736.943,0	80.000.000,0
04.RAL.001	Kapal Pengawas	0	Unit		0,0	11	11	1	680.000.000,0	4.280.736.943,0	80.000.000,0
04.RAL.001.051	Perencanaan Pengadaan Kapal Pengawas	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
04.RAL.001.052	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.800.000,0	79.800.000,0	79.800.000,0
04.RAL.001.052	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	600.000.000,0	4.200.736.943,0	0,0
04.RAL.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
04.RAL.001.055	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan (ABT)	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002	Speedboat Pengawas	0	Unit		0,0	2	2	2	7.000.000,0	7.000.000,0	0,0
04.RAL.002.051	Perencanaan pengadaan speedboat pengawas	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	0,0
04.RAL.002.052	Pengadaan speedboat pengawas perikanan	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.600.000,0	6.600.000,0	0,0
04.RAL.002.053	Monitoring dan evaluasi pengadaan speedboat pengawas	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.RAL.003	Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	10	Unit		10.000.000,0	10	10	0	1.537.874.214,0	0,0	0,0
04.RAL.003.051	Perencanaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	0,0	Laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0
04.RAL.003.052	Pelaksanaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	0,0	Unit	0,0	9.800.000,0	0,0	0,0	0,0	1.535.874.214,0	0,0	0,0
04.RAL.003.053	Monitoring dan Evaluasi Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	0,0	Laporan	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0
04.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Unit		6.800.000,0				6.028.121,0	0,0	0,0
04.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	3	Unit		6.800.000,0	8	8	1	6.028.121,0	0,0	0,0
04.RBQ.001.051	Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	4,0	Laporan	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	169.500,0	0,0	0,0
04.RBQ.001.052	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	4,0	Unit	1.700.000,0	6.800.000,0	4,0	0,0	0,0	5.698.678,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.RBQ.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	4,0	Laporan	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	159.943,0	0,0	0,0
04.RBQ.001.057	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (ABT)	0,0	Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Unit		90.000.000,0				68.420.521,0	43.022.233,0	0,0
04.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	125	Unit		90.000.000,0	127	130	142	68.420.521,0	43.022.233,0	0,0
04.RCG.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	125,0	Unit	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	67.781.351,0	42.388.453,0	0,0
04.RCG.001.051	Perawatan Darurat	15,0	Unit	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	639.170,0	633.780,0	0,0
04.RCG.001.052	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	14,0	laporan	29.380,7	411.330,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.RCG.001.053	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	14,0	unit	6.384.723,1	89.386.124,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
04.RCG.001.054	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	14,0	laporan	14.467,6	202.546,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
Total					689.309.039,0	-	-	-	2.800.513.166,0	4.868.969.176,0	649.988.000,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP		600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
02.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	4.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.050,0
02.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama	140.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140.900,0
02.ABW.001.053	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	5.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.050,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.ABW.002.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABW.002.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.ABW.002.053	Monitoring dan evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
02.AFA.001	NSPK bidang operasi Armada pengawasan SDKP		50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.AFA.001.051	Persiapan Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Pendukung	2.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.430,0
02.AFA.001.052	Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Utama	45.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.140,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.AFA.001.053	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	Pendukung	2.430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.430,0
02.AFA.002	NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.AFA.002.051	Perencanaan NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AFA.002.052	Pelaksanaan NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.AFA.002.053	Monitoring dan evaluasi NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif		580.109.039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580.109.039,0
03.AEA	Koordinasi		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
03.AEA.001	Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
03.AEA.001.051	Perencanaan Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	Pendukung	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
03.AEA.001.052	Pelaksanaan Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	Utama	245.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245.000,0
03.AEA.001.053	Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Awak Kapal Pengawas Nasional	Pendukung	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.AEA.002	Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
03.AEA.002.051	Perencanaan Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	Pendukung	65.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.530,0
03.AEA.002.052	Pelaksanaan Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	Utama	174.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174.630,0
03.AEA.002.053	Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Intelijen Bidang Kelautan dan Perikanan	Pendukung	9.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.840,0
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		8.879.039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.879.039,0
03.BHD.001	Operasional Awak Kapal Pengawas		8.879.039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.879.039,0
03.BHD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.001.051	Perencanaan Operasional Awak Kapal Pengawas	Pendukung	48.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.600,0
03.BHD.001.052	Pelaksanaan Operasional Awak Kapal Pengawas	Utama	8.562.522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.562.522,0
03.BHD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Operasional Awak Kapal Pengawas	Pendukung	267.917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267.917,0
03.BHD.002	Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.002.051	Perencanaan Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.002.052	Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BHD.002.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Pemberantasan Penyelundupan BBL	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
03.FAE.001	Laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
03.FAE.001.051	Perencanaan laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pendukung	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
03.FAE.001.052	Pelaksanaan laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pendukung	225.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225.000,0
03.FAE.001.053	Monitoring dan evaluasi laporan supervisi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
03.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.FBA.001	Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.FBA.001.051	Perencanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.FBA.001.052	Pelaksanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.FBA.001.053	Monitoring dan evaluasi pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan operasi armada	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		570.430.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570.430.000,0
03.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas		359.230.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359.230.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.QHD.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QHD.001.051	Perencanaan Operasi Kapal Pengawas	Pendukung	144.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144.140,0
03.QHD.001.052	Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas	Utama	358.576.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358.576.720,0
03.QHD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Operasi Kapal Pengawas	Pendukung	509.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	509.140,0
03.QHD.002	Operasi Pesawat Patroli		200.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000.000,0
03.QHD.002.051	Perencanaan operasi pengawasan SDKP melalui udara	Pendukung	22.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.950,0
03.QHD.002.052	Operasional pengawasan SDKP melalui udara	Utama	199.964.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199.964.900,0
03.QHD.002.053	Monitoring dan evaluasi operasi pengawasan SDKP melalui udara	Pendukung	12.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.150,0
03.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas		11.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.200.000,0
03.QHD.003.051	Perencanaan operasi speedboat pengawas	Utama	119.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119.000,0
03.QHD.003.052	Pelaksanaan operasi speedboat pengawas	Utama	10.962.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.962.000,0
03.QHD.003.053	Monitoring dan evaluasi operasi speedboat pengawas	Pendukung	119.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119.000,0
04	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan		98.600.000,0	0,0	0,0	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108.600.000,0
04.CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.CAL.001	Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.CAL.001.051	Pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
04.FAE.002	Laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
04.FAE.002.051	Perencanaan laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FAE.002.052	Pelaksanaan laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Utama	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
04.FAE.002.053	Monitoring dan Evaluasi laporan supervisi pengembangan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FBA.002	Pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.FBA.002.051	Perencanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FBA.002.052	Pelaksanaan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FBA.002.053	Monitoring dan evaluasi pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0
04.RAL.001	Kapal Pengawas		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.051	Perencanaan Pengadaan Kapal Pengawas	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.052	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.001.055	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan (ABT)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002	Speedboat Pengawas		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002.051	Perencanaan pengadaan speedboat pengawas	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.002.052	Pengadaan speedboat pengawas perikanan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.RAL.002.053	Monitoring dan evaluasi pengadaan speedboat pengawas	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RAL.003	Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)		0,0	0,0	0,0	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0
04.RAL.003.051	Perencanaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	Pendukung	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.RAL.003.052	Pelaksanaan Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	Utama	0,0	0,0	0,0	9.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.800.000,0
04.RAL.003.053	Monitoring dan Evaluasi Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)	Pendukung	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
04.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		6.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.800.000,0
04.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun		6.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.800.000,0
04.RBQ.001.051	Perencanaan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RBQ.001.052	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	Utama	6.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.800.000,0
04.RBQ.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RBQ.001.057	Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (ABT)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		90.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.RCG.001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat		90.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.000.000,0
04.RCG.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RCG.001.051	Perawatan Darurat	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.RCG.001.052	Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Pendukung	411.330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411.330,0
04.RCG.001.053	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Utama	89.386.124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.386.124,0
04.RCG.001.054	Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas	Pendukung	202.546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202.546,0
Total			679.309.039,0	0,0	0,0	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689.309.039,0

Jakarta, 17 Oktober 2025

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan
4. KEGIATAN : 2351 - Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 02 - Dit. Penanganan Pelanggaran
04 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan
06 - Sekretariat Ditjen PSDKP

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		3.720.000,0
01.01	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82	
01.02	Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	
01.04	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82	
01.05	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	82	
02	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan		450.000,0
02.01	Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	81	
03	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		8.180.000,0
03.01	Indeks penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03.02	Indeks kualitas supervisi penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan	76	
03.03	Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain	72	
03.04	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan	100	
03.05	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipantau	100	
03.06	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakkan Hukum Kelautan dan Perikanan	76	
04	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan		200.000,0
04.01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan pelanggaran	100	
Total			12.550.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</i>										3.720.000,0
01.BCE	Penanganan Perkara										3.720.000,0
01.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif								000 - Bukan Tematik		3.720.000,0
	051 - Persiapan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif										3.720.000,0
		Pusat	Pusat								930.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								124.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								248.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								279.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								279.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								248.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								279.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								155.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								155.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								155.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								124.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								279.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								155.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								248.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								62.000,0
	053 - Monitoring dan evaluasi perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
02	<i>Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan</i>										450.000,0
02.BCE	Penanganan Perkara										450.000,0
02.BCE.001	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani								000 - Bukan Tematik		450.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani										450.000,0
		Pusat	Pusat								450.000,0
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
03	<i>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</i>										8.180.000,0
03.AEA	Koordinasi										1.270.000,0
03.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan								000 - Bukan Tematik		1.270.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan										6.480,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								6.480,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan										1.255.420,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.255.420,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Evaluasi koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan										8.100,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								8.100,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
03.BCB	Perkara Hukum Lembaga										200.000,0
03.BCB.001	Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Perencanaan perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Monitoring dan evaluasi perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
03.BCE	Penanganan Perkara										5.580.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana								000 - Bukan Tematik		5.580.000,0
	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit										620.000,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								248.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								124.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								248.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	051 - Ekspose Awal TPKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pemberkasan Perkara TPKP										4.960.000,0
		Pusat	Pusat								372.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								248.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								496.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								992.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								248.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								124.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								124.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								248.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								248.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								744.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								992.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								124.000,0
	053 - Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	054 - Penjagaan dan logistik Penanganan Awak Kapal										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										1.130.000,0
03.FAE.001	Laporan supervisi penanganan perkara TPKP								000 - Bukan Tematik		1.130.000,0
	051 - Perencanaan laporan supervisi penanganan perkara TPKP										100.000,0
		Pusat	Pusat								100.000,0
	052 - Pelaksanaan laporan supervisi penanganan perkara TPKP										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
	053 - Monitoring dan evaluasi laporan supervisi penanganan perkara TPKP										30.000,0
		Pusat	Pusat								30.000,0
04	<i>Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan</i>										200.000,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
04.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										200.000,0
04.AFA.001	NSPK bidang penanganan pelanggaran								000 - Bukan Tematik		200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
	052 - Pelaksanaan penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran										180.000,0
		Pusat	Pusat								180.000,0
	053 - Evaluasi penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
Total											12.550.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				3.720.000,0				6.886.000,0	6.886.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.BCE	Penanganan Perkara		Perkara		3.720.000,0				6.886.000,0	6.886.000,0	0,0
01.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif	120	Perkara		3.720.000,0	220	220	0	6.886.000,0	6.886.000,0	0,0
01.BCE.U03.051	Persiapan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif	220,0	Perkara	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	231.000,0	231.000,0	0,0
01.BCE.U03.052	Pelaksanaan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif	265,0	Perkara	14.037,7	3.720.000,0	220,0	220,0	0,0	6.270.000,0	6.270.000,0	0,0
01.BCE.U03.053	Monitoring dan evaluasi perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif	265,0	Perkara	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	385.000,0	385.000,0	0,0
02	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan				450.000,0				1.239.201,0	0,0	0,0
02.BCE	Penanganan Perkara		Perkara		450.000,0				1.239.201,0	0,0	0,0
02.BCE.001	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	1	Perkara		450.000,0	2	2	2	1.239.201,0	0,0	0,0
02.BCE.001.051	Perencanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0
02.BCE.001.052	Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	0,0	Perkara	0,0	450.000,0	0,0	0,0	0,0	1.039.201,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.BCE.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				8.180.000,0				14.459.400,0	15.228.900,0	2.542.100,0
03.AEA	Koordinasi		kegiatan		1.270.000,0				2.918.500,0	3.424.000,0	2.529.500,0
03.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	1	kegiatan		1.270.000,0	16	17	4	2.918.500,0	3.424.000,0	2.529.500,0
03.AEA.002.051	Perencanaan koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	15,0	Laporan	432,0	6.480,0	16,0	16,0	4,0	52.000,0	57.000,0	20.000,0
03.AEA.002.052	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	15,0	Kegiatan	83.694,7	1.255.420,0	16,0	16,0	4,0	2.795.000,0	3.295.000,0	2.500.000,0
03.AEA.002.053	Evaluasi koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	24,0	Laporan	337,5	8.100,0	16,0	16,0	4,0	71.500,0	72.000,0	9.500,0
03.BCB	Perkara Hukum Lembaga		Perkara		200.000,0				590.000,0	650.000,0	0,0
03.BCB.001	Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	2	Perkara		200.000,0	8	10	10	590.000,0	650.000,0	0,0
03.BCB.001.051	Perencanaan perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0	150.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.BCB.001.052	Pelaksanaan perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	0,0	Perkara	0,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	330.000,0	350.000,0	0,0
03.BCB.001.053	Monitoring dan evaluasi perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0	150.000,0	0,0
03.BCE	Penanganan Perkara		Perkara		5.580.000,0				4.606.900,0	4.606.900,0	12.600,0
03.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana	45	Perkara		5.580.000,0	60	65	65	4.606.900,0	4.606.900,0	12.600,0
03.BCE.U04.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	54,0	Perkara	11.481,5	620.000,0	60,0	60,0	0,0	6.300,0	6.300,0	0,0
03.BCE.U04.051	Ekspose Awal TPKP	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BCE.U04.052	Pemberkasan Perkara TPKP	6,0	laporan	826.666,7	4.960.000,0	6,0	6,0	0,0	4.600.600,0	4.600.600,0	12.600,0
03.BCE.U04.053	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BCE.U04.054	Penjagaan dan logistik Penanganan Awak Kapal	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Layanan		1.130.000,0				6.344.000,0	6.548.000,0	0,0
03.FAE.001	Laporan supervisi penanganan perkara TPKP	12	Laporan		1.130.000,0	12	12	12	6.344.000,0	6.548.000,0	0,0
03.FAE.001.051	Perencanaan laporan supervisi penanganan perkara TPKP	12,0	Laporan	8.333,3	100.000,0	12,0	12,0	12,0	22.000,0	24.000,0	0,0
03.FAE.001.052	Pelaksanaan laporan supervisi penanganan perkara TPKP	12,0	Laporan	83.333,3	1.000.000,0	12,0	12,0	12,0	6.300.000,0	6.500.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.FAE.001.053	Monitoring dan evaluasi laporan supervisi penanganan perkara TPKP	12,0	Laporan	2.500,0	30.000,0	12,0	12,0	12,0	22.000,0	24.000,0	0,0
04	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan				200.000,0				700.000,0	800.000,0	0,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		0,0				400.000,0	400.000,0	0,0
04.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	1	1	1	400.000,0	400.000,0	0,0
04.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	2,0	Laporan	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	15.000,0	15.000,0	0,0
04.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	375.000,0	375.000,0	0,0
04.ABW.001.053	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	2,0	Laporan	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	10.000,0	10.000,0	0,0
04.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		200.000,0				300.000,0	400.000,0	0,0
04.AFA.001	NSPK bidang penanganan pelanggaran	1	NSPK		200.000,0	1	1	1	300.000,0	400.000,0	0,0
04.AFA.001.051	Perencanaan penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran	2,0	Laporan	5.000,0	10.000,0	3,0	4,0	0,0	3.850,0	3.850,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.AFA.001.052	Pelaksanaan penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran	2,0	NSPK	90.000,0	180.000,0	3,0	4,0	0,0	290.000,0	390.000,0	0,0
04.AFA.001.053	Evaluasi penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran	2,0	Laporan	5.000,0	10.000,0	3,0	4,0	0,0	6.150,0	6.150,0	0,0
Total					12.550.000,0	-	-	-	23.284.601,0	22.914.900,0	2.542.100,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		3.720.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.720.000,0
01.BCE	Penanganan Perkara		3.720.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.720.000,0
01.BCE.U03	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif		3.720.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.720.000,0
01.BCE.U03.051	Persiapan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BCE.U03.052	Pelaksanaan perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif	Utama	3.720.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.720.000,0
01.BCE.U03.053	Monitoring dan evaluasi perkara kelautan dan perikanan yang dikenakan sanksi administratif	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Terselenggaranya penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif dan sesuai ketentuan		450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.BCE	Penanganan Perkara		450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
02.BCE.001	Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani		450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
02.BCE.001.051	Perencanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BCE.001.052	Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	Pendukung	450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
02.BCE.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditangani	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		8.180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.180.000,0
03.AEA	Koordinasi		1.270.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.000,0
03.AEA.002	Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan		1.270.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270.000,0
03.AEA.002.051	Perencanaan koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	Pendukung	6.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.480,0
03.AEA.002.052	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	Utama	1.255.420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.255.420,0
03.AEA.002.053	Evaluasi koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	Pendukung	8.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.100,0
03.BCB	Perkara Hukum Lembaga		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.BCB.001	Perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
03.BCB.001.051	Perencanaan perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BCB.001.052	Pelaksanaan perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
03.BCB.001.053	Monitoring dan evaluasi perkara hukum terkait Ditjen PSDKP yang diselesaikan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BCE	Penanganan Perkara		5.580.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.580.000,0
03.BCE.U04	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana		5.580.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.580.000,0
03.BCE.U04.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Utama	620.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620.000,0
03.BCE.U04.051	Ekspose Awal TPKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BCE.U04.052	Pemberkasan Perkara TPKP	Utama	4.960.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.960.000,0
03.BCE.U04.053	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.BCE.U04.054	Penjagaan dan logistik Penanganan Awak Kapal	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1.130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.130.000,0
03.FAE.001	Laporan supervisi penanganan perkara TPKP		1.130.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.130.000,0
03.FAE.001.051	Perencanaan laporan supervisi penanganan perkara TPKP	Pendukung	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
03.FAE.001.052	Pelaksanaan laporan supervisi penanganan perkara TPKP	Utama	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
03.FAE.001.053	Monitoring dan evaluasi laporan supervisi penanganan perkara TPKP	Pendukung	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.ABW.001.053	Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.AFA.001	NSPK bidang penanganan pelanggaran		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.AFA.001.051	Perencanaan penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran	Pendukung	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
04.AFA.001.052	Pelaksanaan penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran	Utama	180.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180.000,0
04.AFA.001.053	Evaluasi penyusunan draft NSPK bidang penanganan pelanggaran	Pendukung	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Total			12.550.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.550.000,0

Jakarta, 17 Oktober 2025

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. SASARAN PROGRAM : 05 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
4. KEGIATAN : 2352 - Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Dit. Pengendalian Operasi Armada
03 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan
04 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan		9.626.000,0
01.01	Nilai kepatuhan pelaku usaha kelautan	83	
01.02	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan	91	
01.03	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83	
01.04	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya kelautan	86	
01.05	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya kelautan	81	
02	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi		4.700.000,0
02.01	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	100	
02.02	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	83	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
03	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif		2.453.000,0
03.01	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	76	
03.02	Nilai kualitas supervisi intelijen kelautan	76	
03.03	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	76	
03.04	Nilai kualitas supervisi intelijen perikanan	76	
04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		10.521.000,0
04.01	PErsentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	83	
04.02	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan	91	
04.03	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83	
04.04	Nilai kualitas supervisi pengawasan sumber daya perikanan	86	
04.05	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan	81	
06	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		250.000,0
06.01	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	
Total			27.550.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan</i>										9.626.000,0
01.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AEA	Koordinasi										0,0
01.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Persiapan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan										904.500,0
01.BII.001	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan								000 - Bukan Tematik		484.500,0
	051 - Perencanaan/persiapan audit pemanfaatan ruang laut										18.100,0
		Pusat	Pusat								18.100,0
	052 - Pelaksanaan audit pemanfaatan ruang laut										465.400,0
		Pusat	Pusat								465.400,0
	053 - Monitoring dan evaluasi audit pemanfaatan ruang laut										1.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								1.000,0
01.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan								000 - Bukan Tematik		420.000,0
	051 - Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan										42.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								3.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								3.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								3.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								3.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								3.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								3.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								3.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								3.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								3.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								3.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								3.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								3.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								3.000,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								3.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan										350.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								25.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								25.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								25.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								25.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								25.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								25.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								25.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								25.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								25.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								25.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								25.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								25.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								25.000,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								25.000,0
	053 - Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan										28.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								2.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								2.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								2.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								2.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								2.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								2.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								2.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								2.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								2.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								2.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								2.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								2.000,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								2.000,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										1.753.000,0
01.FAE.001	Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan								000 - Bukan Tematik		1.753.000,0
	051 - Perencanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan										80.000,0
		Pusat	Pusat								80.000,0
	052 - Pelaksanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan										1.520.000,0
		Pusat	Pusat								1.520.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan evaluasi laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan										153.000,0
		Pusat	Pusat								153.000,0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										150.000,0
01.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan kelautan										19.484,0
		Pusat	Pusat								19.484,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan										112.142,0
		Pusat	Pusat								112.142,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan kelautan										18.374,0
		Pusat	Pusat								18.374,0
01.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga										6.818.500,0
01.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	004 - Mitigasi perubahan Iklim		6.818.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya										261.500,0
		Pusat	Pusat								5.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								5.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								10.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								10.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								10.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								10.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								191.500,0
	052 - Pelaksanaan unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya										6.183.000,0
		Pusat	Pusat								650.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								225.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								5.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								45.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								350.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								942.500,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								227.500,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								170.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								1.030.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								330.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								825.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								1.095.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								128.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								160.000,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								0,0
	053 - Monitoring dan evaluasi unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya										374.000,0
		Pusat	Pusat								4.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								310.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								10.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								10.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								10.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								10.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								0,0
	054 - Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (ABT)										0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								0,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								0,0
02	<i>Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi</i>										4.700.000,0
02.ACA	Perizinan Produk										700.000,0
02.ACA.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan								000 - Bukan Tematik		700.000,0
	051 - Perencanaan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan										600.000,0
		Pusat	Pusat								600.000,0
	053 - Monitoring dan evaluasi Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
02.RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										4.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.RDS.001	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	000 - Bukan Tematik		4.000.000,0
	051 - Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pemantauan SDKP										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
	052 - Operasional Sistem Pemantauan SDKP										3.900.000,0
		Pusat	Pusat								3.900.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Pemeliharaan Sistem Pemantauan SDKP										50.000,0
		Pusat	Pusat								50.000,0
03	<i>Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif</i>										2.453.000,0
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam										2.453.000,0
03.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan								000 - Bukan Tematik		1.524.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan										30.000,0
		Pusat	Pusat								2.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								2.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								2.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								2.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								2.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								2.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								2.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								2.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								2.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								2.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								2.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								2.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								2.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								2.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								2.000,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan										1.479.000,0
		Pusat	Pusat								121.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								97.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								97.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								97.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								97.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								97.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								97.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								97.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								97.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								97.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								97.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								97.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								97.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								97.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								97.000,0
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan										15.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								1.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								1.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								1.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								1.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								1.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								1.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								1.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								1.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								1.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								1.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								1.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								1.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								1.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								1.000,0
03.BHD.002	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan								000 - Bukan Tematik		929.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan										139.350,0
		Pusat	Pusat								41.805,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								13.935,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								13.935,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								13.935,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								13.935,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								13.935,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								13.935,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								13.935,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan										650.300,0
		Pusat	Pusat								195.090,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								65.030,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								65.030,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								65.030,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								65.030,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								65.030,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								65.030,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								65.030,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan										139.350,0
		Pusat	Pusat								41.805,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								13.935,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								13.935,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								13.935,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								13.935,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								13.935,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								13.935,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								13.935,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
04	<i>Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan</i>										10.521.000,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										200.000,0
04.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan								000 - Bukan Tematik		200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan										52.668,0
		Pusat	Pusat								52.668,0
	052 - Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan										76.920,0
		Pusat	Pusat								76.920,0
	053 - Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan										70.412,0
		Pusat	Pusat								70.412,0
04.AEA	Koordinasi										0,0
04.AEA.002	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Monitoring dan evaluasi koordinasi pengawasan sumber daya perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										1.088.450,0
04.FAE.002	Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan								000 - Bukan Tematik		1.088.450,0
	051 - Perencanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan										143.960,0
		Pusat	Pusat								143.960,0
	052 - Pelaksanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan										690.610,0
		Pusat	Pusat								690.610,0
	053 - Monitoring dan evaluasi laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan										253.880,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								253.880,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										125.000,0
04.FBA.002	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan								000 - Bukan Tematik		125.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan										14.175,0
		Pusat	Pusat								14.175,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan										95.550,0
		Pusat	Pusat								95.550,0
	053 - Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan										15.275,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								15.275,0
04.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga										9.107.550,0
04.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	000 - Bukan Tematik		9.107.550,0
	051 - Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan										1.366.132,0
		Pusat	Pusat								546.453,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								103.257,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								18.254,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								3.545,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								18.254,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								101.707,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								19.274,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								7.732,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								36.841,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								17.213,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								221.956,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								173.063,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								26.961,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								42.623,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								28.999,0
	052 - Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan										6.375.285,0
		Pusat	Pusat								2.550.114,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								481.868,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								85.187,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								16.540,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								85.188,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								474.630,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								89.942,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								36.085,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								171.926,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								80.329,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								1.035.794,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								807.628,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								125.817,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								198.909,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								135.328,0
	053 - Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan										1.366.133,0
		Pusat	Pusat								546.453,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								103.258,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								18.255,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								3.545,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								18.254,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								101.707,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								19.274,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								7.732,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								36.841,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								17.213,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat								221.956,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								173.063,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								26.960,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak								42.623,0
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara								28.999,0
06	<i>Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>										250.000,0
06.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										250.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
06.AFA.001	NSPK Pengawasan Sumber Daya Kelautan								000 - Bukan Tematik		100.000,0
	051 - Persiapan penyusunan NSPK bidang pengawasan sumber daya kelautan										10.120,0
		Pusat	Pusat								10.120,0
	052 - Pelaksanaan penyusunan NSPK bidang pengawasan sumber daya kelautan										89.880,0
		Pusat	Pusat								89.880,0
06.AFA.002	NSPK Pengawasan Sumber Daya Perikanan								000 - Bukan Tematik		150.000,0
	051 - Perencanaan draft/rancangan NSPK										4.860,0
		Pusat	Pusat								4.860,0
	052 - Penyusunan draft/rancangan NSPK										66.910,0
		Pusat	Pusat								66.910,0
	053 - Uji Petik draft/rancangan NSPK										48.905,0
		Pusat	Pusat								48.905,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	054 - Monitoring dan Evaluasi NSPK										29.325,0
		Pusat	Pusat								29.325,0
Total											27.550.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				9.626.000,0				27.018.100,0	29.768.100,0	8.263.000,0
01.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		0,0				460.000,0	470.000,0	0,0
01.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	2	2	2	460.000,0	470.000,0	0,0
01.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	2,0	Laporan	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	55.000,0	60.000,0	0,0
01.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	350.000,0	350.000,0	0,0
01.ABW.001.053	Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	2,0	Lapioran	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	55.000,0	60.000,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		0,0				8.000.000,0	9.000.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan	0	kegiatan		0,0	2	2	2	8.000.000,0	9.000.000,0	0,0
01.AEA.001.051	Persiapan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan	5,0	kegiatan	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	500.000,0	500.000,0	0,0
01.AEA.001.052	Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan	5,0	kegiatan	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	7.000.000,0	8.000.000,0	0,0
01.AEA.001.053	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan	5,0	kegiatan	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	500.000,0	500.000,0	0,0
01.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan		Hektar/ Layanan		904.500,0				1.048.100,0	1.198.100,0	1.353.000,0
01.BII.001	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan	2	Hektar		484.500,0	3	4	4	530.100,0	582.100,0	639.000,0
01.BII.001.051	Perencanaan/persiapan audit pemanfaatan ruang laut	2,0	laporan	9.050,0	18.100,0	3,0	4,0	4,0	28.100,0	29.100,0	35.000,0
01.BII.001.052	Pelaksanaan audit pemanfaatan ruang laut	2,0	laporan	232.700,0	465.400,0	3,0	4,0	4,0	500.000,0	550.000,0	600.000,0
01.BII.001.053	Monitoring dan evaluasi audit pemanfaatan ruang laut	2,0	laporan	500,0	1.000,0	3,0	4,0	4,0	2.000,0	3.000,0	4.000,0
01.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	28	Hektar		420.000,0	42	56	70	518.000,0	616.000,0	714.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.BII.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	28,0	Laporan	1.500,0	42.000,0	42,0	56,0	70,0	56.000,0	70.000,0	84.000,0
01.BII.002.052	Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	28,0	Laporan	12.500,0	350.000,0	42,0	56,0	70,0	420.000,0	490.000,0	560.000,0
01.BII.002.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	28,0	Laporan	1.000,0	28.000,0	42,0	56,0	70,0	42.000,0	56.000,0	70.000,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Layanan		1.753.000,0				2.280.000,0	2.830.000,0	3.390.000,0
01.FAE.001	Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	12	Laporan		1.753.000,0	12	12	12	2.280.000,0	2.830.000,0	3.390.000,0
01.FAE.001.051	Perencanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	12,0	Kegiatan	6.666,7	80.000,0	12,0	12,0	12,0	100.000,0	120.000,0	150.000,0
01.FAE.001.052	Pelaksanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	12,0	kegiatan	126.666,7	1.520.000,0	12,0	12,0	12,0	2.000.000,0	2.500.000,0	3.000.000,0
01.FAE.001.053	Monitoring dan evaluasi laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	12,0	Kegiatan	12.750,0	153.000,0	12,0	12,0	12,0	180.000,0	210.000,0	240.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		150.000,0				200.000,0	260.000,0	320.000,0
01.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)		150.000,0	6	7	8	200.000,0	260.000,0	320.000,0
01.FBA.001.051	Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan kelautan	5,0	laporan	3.896,8	19.484,0	6,0	7,0	8,0	25.000,0	30.000,0	35.000,0
01.FBA.001.052	Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	5,0	Pemerintah daerah	22.428,4	112.142,0	6,0	7,0	8,0	150.000,0	200.000,0	250.000,0
01.FBA.001.053	Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan kelautan	5,0	laporan	3.674,8	18.374,0	6,0	7,0	8,0	25.000,0	30.000,0	35.000,0
01.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga		6.818.500,0				15.030.000,0	16.010.000,0	3.200.000,0
01.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	371	Lembaga		6.818.500,0	635	759	1132	15.030.000,0	16.010.000,0	3.200.000,0
01.QIC.001.051	Perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	866,0	Dokumen	302,0	261.500,0	980,0	1.079,0	13,0	760.000,0	900.000,0	350.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.QIC.001.052	Pelaksanaan unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	683,0	Kegiatan	9.052,7	6.183.000,0	786,0	874,0	164,0	13.720.000,0	14.460.000,0	2.850.000,0
01.QIC.001.053	Monitoring dan evaluasi unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	872,0	dokumen	428,9	374.000,0	993,0	1.099,0	0,0	550.000,0	650.000,0	0,0
01.QIC.001.054	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (ABT)	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi				4.700.000,0				13.660.000,0	13.690.000,0	12.000.000,0
02.ACA	Perizinan Produk		Produk		700.000,0				1.660.000,0	1.690.000,0	0,0
02.ACA.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1326	Produk		700.000,0	5000	5000	5000	1.660.000,0	1.690.000,0	0,0
02.ACA.001.051	Perencanaan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1,0	laporan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	0,0	120.000,0	130.000,0	0,0
02.ACA.001.052	Pelaksanaan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5.000,0	Produk	120,0	600.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	1.420.000,0	1.430.000,0	0,0
02.ACA.001.053	Monitoring dan evaluasi Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	1,0	laporan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	0,0	120.000,0	130.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit/ Kab/Kota/ Kecamatan/ Titik/Lokasi		4.000.000,0				12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
02.RDS.001	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1	Unit		4.000.000,0	1	1	1	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
02.RDS.001.051	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pemantauan SDKP	0,0	laporan	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
02.RDS.001.052	Operasional Sistem Pemantauan SDKP	0,0	unit	0,0	3.900.000,0	0,0	0,0	0,0	11.800.000,0	11.800.000,0	11.800.000,0
02.RDS.001.053	Pemeliharaan Sistem Pemantauan SDKP	0,0	unit	0,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
03	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				2.453.000,0				3.946.900,0	4.146.900,0	4.956.900,0
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		Operasi		2.453.000,0				3.946.900,0	4.146.900,0	4.956.900,0
03.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	15	Operasi		1.524.000,0	30	45	60	2.345.000,0	3.125.000,0	3.935.000,0
03.BHD.001.051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	15,0	Laporan	2.000,0	30.000,0	30,0	45,0	60,0	45.000,0	60.000,0	75.000,0
03.BHD.001.052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	15,0	operasi	98.600,0	1.479.000,0	30,0	45,0	60,0	2.270.000,0	3.020.000,0	3.800.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.BHD.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	15,0	Laporan	1.000,0	15.000,0	30,0	45,0	60,0	30.000,0	45.000,0	60.000,0
03.BHD.002	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	10	Operasi		929.000,0	17	17	7	1.601.900,0	1.021.900,0	1.021.900,0
03.BHD.002.051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	0,0	Laporan	0,0	139.350,0	0,0	0,0	0,0	140.000,0	0,0	0,0
03.BHD.002.052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	11,0	Operasi	59.118,2	650.300,0	11,0	11,0	11,0	1.321.900,0	1.021.900,0	1.021.900,0
03.BHD.002.053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	0,0	Laporan	0,0	139.350,0	0,0	0,0	0,0	140.000,0	0,0	0,0
04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				10.521.000,0				22.220.000,0	20.655.000,0	2.350.000,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		200.000,0				250.000,0	300.000,0	350.000,0
04.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2	Rekomendasi Kebijakan		200.000,0	2	3	3	250.000,0	300.000,0	350.000,0
04.ABW.002.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	26.334,0	52.668,0	2,0	3,0	3,0	24.000,0	25.000,0	30.000,0
04.ABW.002.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	38.460,0	76.920,0	2,0	3,0	3,0	220.000,0	265.000,0	295.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.ABW.002.053	Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	35.206,0	70.412,0	2,0	3,0	3,0	6.000,0	10.000,0	25.000,0
04.AEA	Koordinasi		kegiatan		0,0				1.950.000,0	1.975.000,0	0,0
04.AEA.002	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan	0	kegiatan		0,0	2	2	2	1.950.000,0	1.975.000,0	0,0
04.AEA.002.051	Perencanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0
04.AEA.002.052	Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	0,0	Kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750.000,0	1.775.000,0	0,0
04.AEA.002.053	Monitoring dan evaluasi koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Layanan		1.088.450,0				2.400.000,0	2.500.000,0	0,0
04.FAE.002	Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	12	Laporan		1.088.450,0	12	12	12	2.400.000,0	2.500.000,0	0,0
04.FAE.002.051	Perencanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	0,0	laporan	0,0	143.960,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0
04.FAE.002.052	Pelaksanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	0,0	Laporan	0,0	690.610,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0	2.300.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.FAE.002.053	Monitoring dan evaluasi laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	0,0	Laporan	0,0	253.880,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah (Prov/Kab/Kota)/ Provinsi/ Kab/Kota		125.000,0				675.000,0	715.000,0	0,0
04.FBA.002	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)		125.000,0	25	30	30	675.000,0	715.000,0	0,0
04.FBA.002.051	Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan	0,0	Laporan	0,0	14.175,0	0,0	0,0	0,0	55.000,0	60.000,0	0,0
04.FBA.002.052	Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan	5,0	Pemerintah Daerah	19.110,0	95.550,0	25,0	30,0	30,0	550.000,0	575.000,0	0,0
04.FBA.002.053	Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan	0,0	Laporan	0,0	15.275,0	0,0	0,0	0,0	70.000,0	80.000,0	0,0
04.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga		9.107.550,0				16.945.000,0	15.165.000,0	2.000.000,0
04.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	375	Lembaga		9.107.550,0	1100	1200	1300	16.945.000,0	15.165.000,0	2.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.QIC.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	800,0	Lembaga	1.707,7	1.366.132,0	800,0	800,0	0,0	1.910.000,0	1.720.000,0	0,0
04.QIC.002.052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	873,0	Lembaga	7.302,7	6.375.285,0	853,0	858,0	0,0	13.125.000,0	11.725.000,0	2.000.000,0
04.QIC.002.053	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	800,0	Lembaga	1.707,7	1.366.133,0	800,0	800,0	0,0	1.910.000,0	1.720.000,0	0,0
06	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				250.000,0				370.000,0	530.000,0	640.000,0
06.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK		250.000,0				370.000,0	530.000,0	640.000,0
06.AFA.001	NSPK Pengawasan Sumber Daya Kelautan	1	NSPK		100.000,0	1	1	1	170.000,0	230.000,0	290.000,0
06.AFA.001.051	Persiapan penyusunan NSPK bidang pengawasan sumber daya kelautan	1,0	laporan	10.120,0	10.120,0	1,0	1,0	1,0	20.000,0	30.000,0	40.000,0
06.AFA.001.052	Pelaksanaan penyusunan NSPK bidang pengawasan sumber daya kelautan	1,0	NSPK	89.880,0	89.880,0	1,0	1,0	1,0	150.000,0	200.000,0	250.000,0
06.AFA.002	NSPK Pengawasan Sumber Daya Perikanan	3	NSPK		150.000,0	3	4	4	200.000,0	300.000,0	350.000,0
06.AFA.002.051	Perencanaan draft/rancangan NSPK	3,0	Laporan	1.620,0	4.860,0	3,0	4,0	4,0	18.000,0	20.000,0	25.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
06.AFA.002.052	Penyusunan draft/rancangan NSPK	3,0	NSPK	22.303,3	66.910,0	3,0	4,0	4,0	95.000,0	125.000,0	130.000,0
06.AFA.002.053	Uji Petik draft/rancangan NSPK	3,0	Laporan	16.301,7	48.905,0	3,0	4,0	4,0	52.000,0	85.000,0	100.000,0
06.AFA.002.054	Monitoring dan Evaluasi NSPK	3,0	Laporan	9.775,0	29.325,0	3,0	4,0	4,0	35.000,0	70.000,0	95.000,0
Total					27.550.000,0	-	-	-	67.215.000,0	68.790.000,0	28.209.900,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan		9.626.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.626.000,0
01.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABW.001.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABW.001.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABW.001.053	Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Kelautan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AEA.001.051	Persiapan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.052	Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.053	Monitoring, evaluasi dan pelaporan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan		904.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	904.500,0
01.BII.001	Audit pemanfaatan ruang laut yang dilaporkan		484.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	484.500,0
01.BII.001.051	Perencanaan/persiapan audit pemanfaatan ruang laut	Pendukung	18.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.100,0
01.BII.001.052	Pelaksanaan audit pemanfaatan ruang laut	Utama	465.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465.400,0
01.BII.001.053	Monitoring dan evaluasi audit pemanfaatan ruang laut	Pendukung	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
01.BII.002	Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan		420.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420.000,0
01.BII.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	Pendukung	42.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.000,0
01.BII.002.052	Pelaksanaan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	Utama	350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0
01.BII.002.053	Monev dan pelaporan pemeriksaan pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan	Pendukung	28.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.000,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1.753.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.753.000,0
01.FAE.001	Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan		1.753.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.753.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.FAE.001.051	Perencanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	Pendukung	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0
01.FAE.001.052	Pelaksanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	Utama	1.520.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.520.000,0
01.FAE.001.053	Monitoring dan evaluasi laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor kelautan	Pendukung	153.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153.000,0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.001	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
01.FBA.001.051	Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan kelautan	Pendukung	19.484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.484,0
01.FBA.001.052	Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Kelautan	Utama	112.142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112.142,0
01.FBA.001.053	Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan kelautan	Pendukung	18.374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.374,0
01.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6.818.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.818.500,0
01.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya		6.818.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.818.500,0
01.QIC.001.051	Perencanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya	Utama	261.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261.500,0
01.QIC.001.052	Pelaksanaan unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	Utama	6.183.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.183.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.QIC.001.053	Monitoring dan evaluasi unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	Utama	374.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	374.000,0
01.QIC.001.054	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan yang diperiksa kepatuhannya (ABT)	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi		4.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.700.000,0
02.ACA	Perizinan Produk		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
02.ACA.001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
02.ACA.001.051	Perencanaan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.ACA.001.052	Pelaksanaan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Utama	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
02.ACA.001.053	Monitoring dan evaluasi Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	Pendukung	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0
02.RDS.001	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional		4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0
02.RDS.001.051	Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Pemantauan SDKP	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
02.RDS.001.052	Operasional Sistem Pemantauan SDKP	Utama	3.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.900.000,0
02.RDS.001.053	Pemeliharaan Sistem Pemantauan SDKP	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
03	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif		2.453.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.453.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		2.453.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.453.000,0
03.BHD.001	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		1.524.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.524.000,0
03.BHD.001.051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pendukung	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
03.BHD.001.052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Utama	1.479.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.479.000,0
03.BHD.001.053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pendukung	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
03.BHD.002	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan		929.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	929.000,0
03.BHD.002.051	Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Pendukung	139.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139.350,0
03.BHD.002.052	Pelaksanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Utama	650.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650.300,0
03.BHD.002.053	Monev dan pelaporan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Pendukung	139.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139.350,0
04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		10.521.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.521.000,0
04.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.ABW.002	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.ABW.002.051	Perencanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Pendukung	52.668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52.668,0
04.ABW.002.052	Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Pendukung	76.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76.920,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.ABW.002.053	Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengawasan Perikanan	Pendukung	70.412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.412,0
04.AEA	Koordinasi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA.002	Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA.002.051	Perencanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA.002.052	Pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.AEA.002.053	Monitoring dan evaluasi koordinasi pengawasan sumber daya perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1.088.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.088.450,0
04.FAE.002	Laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan		1.088.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.088.450,0
04.FAE.002.051	Perencanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	Pendukung	143.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143.960,0
04.FAE.002.052	Pelaksanaan laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	Utama	690.610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690.610,0
04.FAE.002.053	Monitoring dan evaluasi laporan supervisi pengawasan kepatuhan usaha sektor perikanan	Pendukung	253.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253.880,0
04.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		125.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125.000,0
04.FBA.002	Pemerintah Daerah yang dibina dalam pelaksanaan Pengawasan Perikanan		125.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125.000,0
04.FBA.002.051	Perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan	Pendukung	14.175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.175,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
04.FBA.002.052	Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan	Utama	95.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95.550,0
04.FBA.002.053	Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintah daerah dibina dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan	Pendukung	15.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.275,0
04.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		9.107.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.107.550,0
04.QIC.002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya		9.107.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.107.550,0
04.QIC.002.051	Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Pendukung	1.366.132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.366.132,0
04.QIC.002.052	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Utama	6.375.285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.375.285,0
04.QIC.002.053	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Pendukung	1.366.133,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.366.133,0
06	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
06.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0
06.AFA.001	NSPK Pengawasan Sumber Daya Kelautan		100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0
06.AFA.001.051	Persiapan penyusunan NSPK bidang pengawasan sumber daya kelautan	Pendukung	10.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.120,0
06.AFA.001.052	Pelaksanaan penyusunan NSPK bidang pengawasan sumber daya kelautan	Utama	89.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.880,0
06.AFA.002	NSPK Pengawasan Sumber Daya Perikanan		150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
06.AFA.002.051	Perencanaan draft/rancangan NSPK	Pendukung	4.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.860,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
06.AFA.002.052	Penyusunan draft/rancangan NSPK	Pendukung	66.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.910,0
06.AFA.002.053	Uji Petik draft/rancangan NSPK	Pendukung	48.905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.905,0
06.AFA.002.054	Monitoring dan Evaluasi NSPK	Pendukung	29.325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.325,0
Total			27.550.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.550.000,0

Jakarta, 17 Oktober 2025

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
3. SASARAN PROGRAM : 04 - Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan
4. KEGIATAN : 2353 - Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 01 - Dit. Pengendalian Operasi Armada
02 - Dit. Penanganan Pelanggaran
03 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Perikanan
04 - Dit. Pengawasan Sumber Daya Kelautan
06 - Sekretariat Ditjen PSDKP

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
02	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif		500.000,0
02.01	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan	81	
02.02	Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens sosialisasi penyadartahuan masyakarakat perikanan	81	
03	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif		900.000,0
03.01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	
03.02	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	83	
03.03	Persentase penyelesaian pedoman pembinaan pokmaswas	100	
04	Terselenggaranya pemberitaan sektor pengawasan kelautan dan perikanan kepada masyarakat yang masif		200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
04.01	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	
04.02	Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	86	
Total			1.600.000,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02	<i>Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif</i>										500.000,0
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan										0,0
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		0,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat										500.000,0
02.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat										68.600,0
		Pusat	Pusat								68.600,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan										223.300,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								223.300,0
	053 - evaluasi kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan										8.100,0
		Pusat	Pusat								8.100,0
02.BDC.004	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Perencanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Monev dan pelaporan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03	<i>Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif</i>										900.000,0
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										200.000,0
03.FAE.001	Laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Perencanaan Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - PelaksanaanPemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
03.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat										700.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
03.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)								003 - Anggaran Responsif Gender		700.000,0
	051 - Perencanaan pembinaan POKMASWAS										0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS										700.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								50.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								50.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								50.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								50.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								50.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								50.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								50.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								50.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								50.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								50.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								50.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								50.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								50.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS										0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
04	<i>Terselenggaranya pemberitaan sektor pengawasan kelautan dan perikanan kepada masyarakat yang masif</i>										200.000,0
04.BMB	Komunikasi Publik										200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
04.BMB.001	Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Perencanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0
	053 - Evaluasi Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
Total											1.600.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif				500.000,0				1.433.000,0	1.498.000,0	500.000,0
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		Rekomendasi Kebijakan		0,0				500.000,0	500.000,0	500.000,0
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	2	2	2	500.000,0	500.000,0	500.000,0
02.ABW.001.051	Perencanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	1,0	Laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
02.ABW.001.052	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	2,0	Rekomendasi Kebijakan	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0
02.ABW.001.053	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	1,0	Laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Orang		500.000,0				933.000,0	998.000,0	0,0
02.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	200	Orang		300.000,0	200	250	300	609.000,0	662.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
02.BDC.001.051	Perencanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat	1,0	kegiatan	68.600,0	68.600,0	1,0	1,0	0,0	59.000,0	62.000,0	0,0
02.BDC.001.052	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	300,0	orang	744,3	223.300,0	400,0	400,0	0,0	400.000,0	450.000,0	0,0
02.BDC.001.053	evaluasi kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	1,0	kegiatan	8.100,0	8.100,0	1,0	1,0	0,0	150.000,0	150.000,0	0,0
02.BDC.004	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	200	Orang		200.000,0	400	500	600	324.000,0	336.000,0	0,0
02.BDC.004.051	Perencanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	200,0	Orang	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	52.000,0	53.000,0	0,0
02.BDC.004.052	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	200,0	Orang	1.000,0	200.000,0	200,0	200,0	0,0	220.000,0	230.000,0	0,0
02.BDC.004.053	Monev dan pelaporan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	200,0	Orang	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	52.000,0	53.000,0	0,0
03	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				900.000,0				8.774.000,0	9.661.000,0	0,0
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		Laporan/ Layanan		200.000,0				374.000,0	386.000,0	0,0
03.FAE.001	Laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	12	Laporan		200.000,0	38	38	38	374.000,0	386.000,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
03.FAE.001.051	Perencanaan Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1,0	Laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	52.000,0	53.000,0	0,0
03.FAE.001.052	PelaksanaanPemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	34,0	Laporan	5.882,4	200.000,0	34,0	34,0	0,0	270.000,0	280.000,0	0,0
03.FAE.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	34,0	Laporan	0,0	0,0	34,0	34,0	0,0	52.000,0	53.000,0	0,0
03.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Kelompok Masyarakat		700.000,0				8.400.000,0	9.275.000,0	0,0
03.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	14	Kelompok Masyarakat		700.000,0	1110	1110	1110	8.400.000,0	9.275.000,0	0,0
03.QDD.001.051	Perencanaan pembinaan POKMASWAS	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350.000,0	1.500.000,0	0,0
03.QDD.001.052	Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	0,0	Kelompok Masyarakat	0,0	700.000,0	0,0	0,0	0,0	5.725.000,0	6.275.000,0	0,0
03.QDD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.325.000,0	1.500.000,0	0,0
04	Terselenggaranya pemberitaan sektor pengawasan kelautan dan perikanan kepada masyarakat yang masif				200.000,0				750.000,0	0,0	0,0
04.BMB	Komunikasi Publik		layanan/ konten		200.000,0				750.000,0	0,0	0,0
04.BMB.001	Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	kegiatan		200.000,0	1	1	1	750.000,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
04.BMB.001.051	Perencanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0
04.BMB.001.052	Pelaksanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Kegiatan	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	0,0	650.000,0	0,0	0,0
04.BMB.001.053	Evaluasi Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,0	Kegiatan	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	50.000,0	0,0	0,0
Total					1.600.000,0	-	-	-	10.957.000,0	11.159.000,0	500.000,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02	Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyakarakat kelautan dan perikanan secara efektif		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
02.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABW.001	Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABW.001.051	Perencanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
02.ABW.001.052	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABW.001.053	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
02.BDC.001	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
02.BDC.001.051	Perencanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat	Pendukung	68.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68.600,0
02.BDC.001.052	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Utama	223.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223.300,0
02.BDC.001.053	evaluasi kegiatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	Pendukung	8.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.100,0
02.BDC.004	Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.BDC.004.051	Perencanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BDC.004.052	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
02.BDC.004.053	Monev dan pelaporan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif		900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900.000,0
03.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
03.FAE.001	Laporan supervisi pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.FAE.001.051	Perencanaan Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.FAE.001.052	PelaksanaanPemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
03.FAE.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pemantauan hasil pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
03.QDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
03.QDD.001.051	Perencanaan pembinaan POKMASWAS	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.QDD.001.052	Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	Utama	700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700.000,0
03.QDD.001.053	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan POKMASWAS	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Terselenggaranya pemberitaan sektor pengawasan kelautan dan perikanan kepada masyarakat yang masif		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.BMB	Komunikasi Publik		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.BMB.001	Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.BMB.001.051	Perencanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.BMB.001.052	Pelaksanaan Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
04.BMB.001.053	Evaluasi Komunikasi publik bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
Total			1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0

Jakarta, 17 Oktober 2025

REKAP 3A: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 03 - Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP
4. KEGIATAN : 2355 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 06 - Sekretariat Ditjen PSDKP

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		315.974.333,0
01.01	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen PSDKP	81,75	
01.02	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92,1	
01.03	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP	81,5	
01.04	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	88,2	
01.05	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PSDKP	3,6	
01.06	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	100	
01.07	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PSDKP	86	
01.08	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86	

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2026	ALOKASI 2026 (RIBU)
01.09	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	88,8	
01.10	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	
01.11	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	70	
01.12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	80	
01.13	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen. PSDKP	81	
01.14	Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	78	
01.15	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP	61	
01.16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen PSDKP	77	
01.17	Nilai implementasi program budaya kerja	71	
01.18	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP	0,5	
01.19	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Ditjen PSDKP	77	
01.20	Indeks Pelayanan Publik Ditjen PSDKP	3,7	
01.21	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP Ditjen. PSDKP	85	
01.22	Persentase implementasi kerja sama	80	
01.23	Indeks efektivitas kinerja Sekretariat RPOA-IUU	80	
01.24	Nilai pembangunan integritas	77	
01.25	Persentase permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan Ditjen PSDKP yang ditangani	70	
01.26	Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan SDKP	85	
01.27	Persentase produksi konten media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	
Total			315.974.333,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>										315.974.333,0
01.AEC	Kerja sama										460.000,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								000 - Bukan Tematik		460.000,0
	051 - Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										460.000,0
		Pusat	Pusat								460.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi										500.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi								000 - Bukan Tematik		500.000,0
	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi										500.000,0
		Pusat	Pusat								500.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										304.114.333,0
01.EBA.956	Layanan BMN								000 - Bukan Tematik		370.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Pengelolaan BMN										370.000,0
		Pusat	Pusat								370.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Pengelolaan BMN										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum								000 - Bukan Tematik		270.000,0
	051 - Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan										270.000,0
		Pusat	Pusat								270.000,0
	053 - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								000 - Bukan Tematik		800.000,0
	051 - Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat										780.000,0
		Pusat	Pusat								579.200,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								10.700,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								9.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								51.500,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								10.700,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								9.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.700,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								9.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								17.500,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								9.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								9.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								26.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								9.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								10.700,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								9.000,0
	054 - Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat										10.000,0
		Pusat	Pusat								10.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal								000 - Bukan Tematik		300.000,0
	051 - Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Penataan Organisasi dan Tata Kelola										300.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								300.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.962	Layanan Umum								000 - Bukan Tematik		4.772.500,0
	051 - Layanan umum rumah tangga										4.772.500,0
		Pusat	Pusat								3.372.500,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								100.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								100.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								100.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								100.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								100.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								100.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								100.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								100.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								100.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								100.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								100.000,0
	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								0,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								0,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								0,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan								0,0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu								0,0
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung								0,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								0,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								0,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan								0,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah								0,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								0,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara								0,0
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat								0,0
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara								0,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								0,0
		Provinsi Papua	Provinsi Papua								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	054 - Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								000 - Bukan Tematik		600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Perencanaan Pengelolaan data dan informasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan Data Pengawasan SDKP										600.000,0
		Pusat	Pusat								600.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	054 - Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum								000 - Bukan Tematik		27.500,0
	051 - Persiapan Bantuan Hukum										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Pelaksanaan Bantuan Hukum										27.500,0
		Pusat	Pusat								27.500,0
	053 - Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		296.974.333,0
	001 - Gaji dan Tunjangan										247.546.905,0
		Pusat	Pusat								109.026.881,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								9.435.863,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								11.393.480,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								13.510.311,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								10.210.387,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								11.493.279,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								10.887.427,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								7.357.355,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								12.062.553,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								6.394.159,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								4.417.712,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								15.173.321,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								7.172.089,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								11.894.652,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								7.117.436,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor										49.427.428,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								24.827.428,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								2.500.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								1.650.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								2.300.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								2.900.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								1.700.000,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								1.650.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								1.000.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								1.700.000,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								1.650.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								1.550.000,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								1.200.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								1.300.000,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								1.650.000,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								1.850.000,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1.000.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal								000 - Bukan Tematik		800.000,0
	051 - Pengadaan kendaraan bermotor										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
	054 - Penataan Ruang										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal								000 - Bukan Tematik		200.000,0
	051 - Pengadaan prasarana perkantoran										200.000,0
		Pusat	Pusat								200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal										3.200.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM								000 - Bukan Tematik		1.000.000,0
	051 - Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai										1.000.000,0
		Pusat	Pusat								1.000.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
	052 - Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
	053 - Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								003 - Anggaran Responsif Gender		2.200.000,0
	051 - Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP										2.200.000,0
		Pusat	Pusat								2.200.000,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal										6.700.000,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran								003 - Anggaran Responsif Gender		2.000.000,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	052 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran										2.000.000,0
		Pusat	Pusat								2.000.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	053 - Fasilitas Revisi Anggaran										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	054 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	055 - Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								000 - Bukan Tematik		800.000,0
	051 - Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										800.000,0
		Pusat	Pusat								800.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								000 - Bukan Tematik		1.900.000,0
	051 - Perencanaan Pengelolaan Keuangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	052 - Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan										1.900.000,0
		Pusat	Pusat								1.900.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
	053 - Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								000 - Bukan Tematik		1.600.000,0
	051 - Perencanaan Reformasi Kinerja										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	052 - Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP										1.600.000,0
		Pusat	Pusat								1.600.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	053 - Pengelolaan Kinerja Pegawai										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
	054 - Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
	055 - Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja										0,0
		Pusat	Pusat								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara								0,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap								0,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								0,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang								0,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya								0,0
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe								0,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon								0,0
		Provinsi Maluku	Kota Tual								0,0
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor								0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								000 - Bukan Tematik		400.000,0
	051 - Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										400.000,0
		Pusat	Pusat								400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
Total											315.974.333,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				315.974.333,0				183.719.128,0	184.794.128,0	186.239.128,0
01.AEC	Kerja sama		Kesepakatan		460.000,0				2.850.000,0	2.850.000,0	2.850.000,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3	Dokumen		460.000,0	4	4	0	2.850.000,0	2.850.000,0	2.850.000,0
01.AEC.001.051	Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0
01.AEC.001.052	Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	460.000,0	0,0	0,0	0,0	2.350.000,0	2.350.000,0	2.350.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.AEC.001.053	Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250.000,0	250.000,0	250.000,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		500.000,0				1.980.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	45	Unit		500.000,0	140	140	140	1.980.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
01.CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0,0	unit	0,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	1.980.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Perkara		304.114.333,0				138.878.928,0	139.128.928,0	139.378.928,0
01.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		370.000,0	8	8	8	1.425.000,0	1.425.000,0	1.425.000,0
01.EBA.956.051	Perencanaan Pengelolaan BMN	0,0	layanan	0,0	370.000,0	0,0	0,0	0,0	1.025.000,0	1.025.000,0	1.025.000,0
01.EBA.956.052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBA.956.053	Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		270.000,0	1	1	1	970.000,0	1.070.000,0	1.170.000,0
01.EBA.957.051	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.957.052	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan	0,0	Layanan	0,0	270.000,0	0,0	0,0	0,0	770.000,0	870.000,0	970.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBA.957.053	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		800.000,0	3	3	3	1.620.000,0	1.720.000,0	1.820.000,0
01.EBA.958.051	Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.958.052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	780.000,0	0,0	0,0	0,0	1.420.000,0	1.520.000,0	1.620.000,0
01.EBA.958.054	Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat	0,0	dokumen	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		300.000,0	1	1	1	1.000.000,0	1.050.000,0	1.100.000,0
01.EBA.960.051	Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.960.052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	Layanan	0,0	300.000,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0	850.000,0	900.000,0
01.EBA.960.053	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan		4.772.500,0	1	1	1	4.300.000,0	4.300.000,0	4.300.000,0
01.EBA.962.051	Layanan umum rumah tangga	0,0	Layanan	0,0	4.772.500,0	0,0	0,0	0,0	1.400.000,0	1.400.000,0	1.400.000,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan arsip dan persuratan	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.EBA.962.053	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBA.962.054	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		600.000,0	1	1	1	1.300.000,0	1.300.000,0	1.300.000,0
01.EBA.963.051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.963.052	Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	0,0	Layanan	0,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.EBA.963.053	Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP	0,0	Layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0	600.000,0	600.000,0
01.EBA.963.054	Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		27.500,0	2	2	2	42.976,0	42.976,0	42.976,0
01.EBA.969.051	Persiapan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
01.EBA.969.052	Pelaksanaan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	27.500,0	0,0	0,0	0,0	32.976,0	32.976,0	32.976,0
01.EBA.969.053	Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum	0,0	layanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		296.974.333,0	1	1	1	128.220.952,0	128.220.952,0	128.220.952,0
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	0,0	layanan	0,0	247.546.905,0	0,0	0,0	0,0	64.110.476,0	64.110.476,0	64.110.476,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0,0	layanan	0,0	49.427.428,0	0,0	0,0	0,0	64.110.476,0	64.110.476,0	64.110.476,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ Paket		1.000.000,0				7.631.000,0	7.856.000,0	8.151.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	60	Unit		800.000,0	270	276	268	4.881.000,0	5.056.000,0	5.231.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBB.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	0,0	unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0	1.700.000,0	1.700.000,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0,0	unit	0,0	800.000,0	0,0	0,0	0,0	2.681.000,0	2.856.000,0	3.031.000,0
01.EBB.951.054	Penataan Ruangan	0,0	unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	6	Unit		200.000,0	24	24	10	2.750.000,0	2.800.000,0	2.920.000,0
01.EBB.971.051	Pengadaan prasarana perkantoran	0,0	unit	0,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	2.750.000,0	2.800.000,0	2.920.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		3.200.000,0				11.115.000,0	10.965.000,0	11.115.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1532	Orang		1.000.000,0	1532	1532	1532	3.765.000,0	3.765.000,0	3.765.000,0
01.EBC.954.051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	0,0	orang	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai	0,0	orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0
01.EBC.954.053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	0,0	Orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365.000,0	365.000,0	365.000,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	319	Orang		2.200.000,0	319	319	319	7.350.000,0	7.200.000,0	7.350.000,0
01.EBC.996.051	Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBC.996.052	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
01.EBC.996.053	Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	150.000,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Layanan/ Rekomendasi		6.700.000,0				21.264.200,0	22.014.200,0	22.764.200,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	Dokumen		2.000.000,0	4	4	4	5.099.200,0	5.599.200,0	6.099.200,0
01.EBD.952.051	Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198.400,0	198.400,0	198.400,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	0,0	dokumen	0,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.500.000,0	4.000.000,0
01.EBD.952.053	Fasilitasi Revisi Anggaran	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220.000,0	220.000,0	220.000,0
01.EBD.952.054	Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.470.800,0	1.470.800,0	1.470.800,0
01.EBD.952.055	Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210.000,0	210.000,0	210.000,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen		800.000,0	4	4	4	2.800.000,0	2.900.000,0	3.000.000,0
01.EBD.953.051	Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBD.953.052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	800.000,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0	2.200.000,0	2.300.000,0
01.EBD.953.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4	Layanan		1.900.000,0	4	4	4	6.400.000,0	6.450.000,0	6.500.000,0
01.EBD.955.051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350.000,0	350.000,0	350.000,0
01.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	0,0	Laporan	0,0	1.900.000,0	0,0	0,0	0,0	5.750.000,0	5.800.000,0	5.850.000,0
01.EBD.955.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan	0,0	Laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Layanan		1.600.000,0	1	1	1	5.500.000,0	5.500.000,0	5.500.000,0
01.EBD.961.051	Perencanaan Reformasi Kinerja	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBD.961.052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	0,0	dokumen	0,0	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
01.EBD.961.053	Pengelolaan Kinerja Pegawai	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0,0	dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
01.EBD.961.055	Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja	0,0	laporan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0	200.000,0	200.000,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		400.000,0	1	1	1	1.465.000,0	1.565.000,0	1.665.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2026			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2026 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2027	2028	2029	2027	2028	2029
01.EBD.974.051	Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
01.EBD.974.052	Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	400.000,0	0,0	0,0	0,0	1.265.000,0	1.365.000,0	1.465.000,0
01.EBD.974.053	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	0,0	kegiatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0
Total					315.974.333,0	-	-	-	183.719.128,0	184.794.128,0	186.239.128,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		315.974.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315.974.333,0
01.AEC	Kerja sama		460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460.000,0
01.AEC.001	Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460.000,0
01.AEC.001.051	Perencanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEC.001.052	Pelaksanaan Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Utama	460.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AEC.001.053	Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Bidang pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pendukung	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		304.114.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304.114.333,0
01.EBA.956	Layanan BMN		370.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.000,0
01.EBA.956.051	Perencanaan Pengelolaan BMN	Pendukung	370.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370.000,0
01.EBA.956.052	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.053	Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan BMN	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum		270.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270.000,0
01.EBA.957.051	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.052	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	270.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270.000,0
01.EBA.957.053	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBA.958.051	Perencanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
01.EBA.958.052	Pelaksanaan Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	780.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780.000,0
01.EBA.958.054	Evaluasi Publikasi dan Hubungan Masyarakat	Pendukung	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.EBA.960.051	Perencanaan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.052	Penataan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
01.EBA.960.053	Evaluasi dan Pelaporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum		4.772.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.772.500,0
01.EBA.962.051	Layanan umum rumah tangga	Pendukung	4.772.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.772.500,0
01.EBA.962.052	Pengelolaan arsip dan persuratan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.053	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.054	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
01.EBA.963.051	Perencanaan Pengelolaan data dan informasi	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.052	Pengelolaan Data Pengawasan SDKP	Pendukung	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
01.EBA.963.053	Satu Data KKP Bidang Pengawasan SDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.054	Evaluasi/Pelaporan pengelolaan data dan informasi	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		27.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.500,0
01.EBA.969.051	Persiapan Bantuan Hukum	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969.052	Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pendukung	27.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.500,0
01.EBA.969.053	Evaluasi/Pelaporan Bantuan Hukum	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran		296.974.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296.974.333,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	247.546.905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247.546.905,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	49.427.428,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.427.428,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal		800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBB.951.051	Pengadaan kendaraan bermotor	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Pendukung	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBB.951.054	Penataan Ruangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.EBB.971.051	Pengadaan prasarana perkantoran	Pendukung	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.EBC.954.051	Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai	Pendukung	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
01.EBC.954.052	Pengelolaan Administrasi dan Mutasi Pegawai	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.053	Penatausahaan SDM dan Jabatan Fungsional	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0
01.EBC.996.051	Perencanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996.052	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	2.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200.000,0
01.EBC.996.053	Evaluasi dan Pelaporan Diklat Internal lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		6.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.700.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.EBD.952.051	Perencanaan Penyusunan Dokumen rencana dan anggaran	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	Pendukung	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.EBD.952.053	Fasilitasi Revisi Anggaran	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.054	Penyusunan Dokumen Perencanaan Umum	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.055	Evaluasi dan Pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBD.953.051	Perencanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.052	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
01.EBD.953.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Program dan Kegiatan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900.000,0
01.EBD.955.051	Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.052	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	1.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900.000,0
01.EBD.955.053	Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Pengelolaan Keuangan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
01.EBD.961.051	Perencanaan Reformasi Kinerja	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.052	Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP	Pendukung	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.EBD.961.053	Pengelolaan Kinerja Pegawai	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.054	Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.055	Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Kinerja	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.EBD.974.051	Perencanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974.052	Pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Utama	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400.000,0
01.EBD.974.053	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan kearsipan lingkup Ditjen. PSDKP	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			315.974.333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315.974.333,0

Jakarta, 17 Oktober 2025